

KONSTRUKSI REALITAS PETISI PENOLAKAN PEMINDAHAN DAN PEMBANGUNAN IKN PADA MEDIA *ONLINE* KOMPAS.COM DAN DETIK.COM

Maria Yolanda¹, Agustinus Rustanta²

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita^{1,2}
e-mail : mar.22yolanda@gmail.com¹, agusrustanta@gmail.com²

Abstract

The development of the Capital City of Republic of Indonesia (IKN) is not as successful as thought, various reactions of the public also color the process of the plan of transfer of IKN. This research focuses on the rejection petitions. The purpose of this research is to analyze the media distortions about the ICT refusal petitions on the announcements of Kompas.com and Detik.com, period 5-10 February 2022. The data was analyzed using a model analysis framing Pan and Kosicki models. After conducting an analysis of the two online media reports, it was concluded that Kompas.com and Detik.com did the construction of the content of the news using different framing. Kompas.com tends to frame President Jokowi's stubborn and indifferent personality, as well as use the viewpoint that attacked the Jokowi administration in connection with the emergence of the Petition Rejecting the Movement and Development of the Capital City, and is specifically associated with the second period of the Presidency of Jokowi. Detik.com framed President Jokowi's personality positively with the presence of a plan for the transfer of IKN in Indonesia's future interests. However, on the other hand, it also produced an announcement that also uses another angle of view to criticize the existence of an IKN movement plan that is associated with economic issues so that the plan for transferring IKN is seen as having no urgency

Keywords: Framing, Construction of Reality, News, IKN

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak semulus yang dipikirkan, berbagaitanggapan masyarakat turut mewarnai proses rencana pemindahan IKN. Penelitian ini fokus pada petisi penolakan IKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pbingkaian media tentang petisi penolakan IKN pada pemberitaan Kompas.com dan Detik.com, periode 5-10 Februari 2022. Data dianalisis menggunakan model analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Setelah melakukan analisis terhadap pemberitaan kedua media *online* tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Kompas.com dan Detik.com melakukan konstruksi isi berita dengan menggunakan *framing* yang berbeda. Kompas.com cenderung membingkai sosok Presiden Jokowi yang keras kepala dan acuh, serta menggunakan sudut pandang yang menyerang pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan munculnya Petisi Menolak Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara, serta secara khusus dikaitkan pada masa periode kedua masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sedangkan, Detik.com cenderung memproduksi pemberitaan terkait adanya petisi penolakan IKN dengandua sudut pandang yang mengesankan bahwa Detik.com bersikap netral. Detik.com membingkai sosok Presiden Jokowi secara positif dengan adanya rencana pemindahan IKN kepentingan masa depan Indonesia. Namun, di sisi lain Detik.com juga memproduksi pemberitaan yang turut menggunakan sudut pandang lain yaitu mengkritisi adanya rencana pemindahan IKN yang dikaitkan dengan persoalan ekonomi sehingga rencana pemindahan IKN dipandang tidak memiliki urgensi.

Kata kunci: *Framing*, Konstruksi Realitas, Berita dan IKN

PENDAHULUAN

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah suatu fenomena baru selama berdirinya bangsa Indonesia, melainkan telah dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Pembahasan terkait pemindahan Ibu Kota Negara telah menjadi sebuah gagasan yang beberapa kali timbul lalu tenggelam pada setiap era kepemimpinan Presiden RI. Kini Presiden Joko Widodo kembali menggagas rencana pemindahan IKN pada era kepemimpinannya. Presiden Joko Widodo melaksanakan rapat terbatas dengan paramenteri pada tanggal 29 April 2019 yang dilaksanakan di kantor presiden. Pada rapat tersebut Bapak Presiden menyampaikan rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi Jakarta yang dinilai tidak lagimemungkinkan untuk menanggung beban sebagai Ibu Kota Negara dalam beberapatahun kedepan. Bapak Presiden menegaskan bahwa Jakarta memikul dua beban berat sebagai ibu kota, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Selama menjadi Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta telah menanggung beban yang berat dan kompleks. Mulai dari tugas multifungsi yang diemban sebagai ibu kota, seperti: Pusat Perekonomian, Pusat Pemerintahan, Pusat Layanan Publik, hingga dalam menampung kepadatan penduduk yang menimbulkan sederet permasalahan lainnya bagi DKI Jakarta. Sebagai wilayah dengan tingkat konsentrasi penduduk tertinggi di Indonesia, Pulau Jawa dan khususnya Jakarta dituntut untuk terus membenahi serta mengembangkan segala aspek untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan penduduk Jakarta yang terus mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan ketersediaan wilayah yang cukup, menghasilkan beragam permasalahan di DKI Jakarta. Pembangunan tempattinggal, penggunaan lahan secara illegal dan tidak terencana, marak terjadi di DKI Jakarta. Hal ini memberikan dampak yakni berkurangnya daerah resapan air yang dibutuhkan DKI Jakarta untuk mengumbangi curah hujan tinggi atas faktor pemanasan global. Akhirnya berujung pada akibat besar yang selama ini dialami oleh DKI Jakarta yakni banjir.

Kualitas air di wilayah Provinsi DKI Jakarta, menurut data dinas lingkungan hidup, mengalami pencemaran. Ketersediaan air bersih memiliki peranan penting bagi masyarakat umum hingga kepentingan industri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terdapat permintaan tinggi untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan pelaku bisnis terhadap ketersediaan air bersih, akan tetapi di lain sisi pasokan air bersih terbatas. Pada akhirnya, eksploitasi air tanah marak terjadi dengan pengerukan tanah yang secara ilegal yang tidak terkendali dan berkepanjangan hingga berimbas pada penurunan permukaan tanah. Berdasarkan data Badan Geologi, dengan adanya eksploitasi air tanah yang marak terjadi mengakibatkan penurunan permukaan tanah Jakarta dan memiliki dampak ancamanserius terhadap fenomena tenggelamnya Jakarta, hal ini didukung dengan catatan Badan Geologi bahwa terdapat pengambilan air tanah Jakarta dari 4500 sumur produksi serta sumur illegal lainnya yang tidak memiliki izin perusahaan yang belum termasuk dalam hitungan untuk memenuhi kebutuhan komersil (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.).

Konsentrasi penduduk yang tinggi pada DKI Jakarta juga kian memicu permasalahan lainnya seperti kemacetan lalu lintas. Dalam survei yang dilakukan oleh perusahaan analisis dan penyedia data pengelolaan lalu lintas asal Amerika Serikat (INRIX) yang ditulis dalam laporan *Global Traffic Scorecard 2021*. Pada hasil survei tersebut, INRIX melaporkan terdapat lima kota termacet di Indonesia, yaitu Surabaya, DKI Jakarta, Denpasar, Malang dan Bogor. Berdasarkan data kotatermacet tersebut terdapat empat kota yang terletak di Pulau Jawa dan Jakarta menduduki peringkat kedua sebagai kota termacet di Indonesia. Kemacetan lalu lintas diakibatkan oleh menumpuknya populasi kendaraan yang tidak terkontrol serta ruas jalan yang terbatas sehingga tidak mampu menampung kendaraan. Selain itu permasalahan populasi kendaraan yang tak terkontrol di Jakarta punmenambahkan beban Jakarta yaitu permasalahan polusi udara yang mengancam, kesehatan masyarakat terutama kelompok sensitif. Dikatakan bahwa penyebab polusi udara di Jakarta 75 persen dari adanya emisi transportasi kendaraan bermotor. Pengguna

sepeda motor menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan moda transportasi, peningkatan pengguna kendaraan sepeda motor di Jakarta kian bertambah setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, n.d.-b). Pada laporan kualitas udara dunia yang dirilis oleh sebuah perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss (IQair) menempatkan DKI Jakarta sebagai kota peringkat ke-4 dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta secara umum memberi dampak pada lingkungan berupa perubahan iklim serta pemanasan global. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Verisk Maplecroft sebuah perusahaan konsultan strategis dan risiko global berbasis di Inggris. Data yang dihasilkan dalam survei tersebut menyimpulkan bahwa Jakarta sebagai kota paling berisiko di dunia, hal tersebut dilatarbelakangi dari kombinasi polusi, krisis air bersih, tekanan panas yang ekstrem, darurat bencana alam serta kerentanan terhadap perubahan iklim (Verisk Maplecroft, 2021).

Pada momentum pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin dan dukungan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Menurut Presiden Joko Widodo, Ibu Kota suatu negara tidak hanya sebagai simbol suatu bangsa, akan tetapi juga representasi kemajuan bangsa. “Pemindahan Ibu Kota bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan serta demi visi Indonesia Maju,” tegas Jokowi (Sekretariat Presiden, 2019). Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) telah melakukan kajian serta persiapan terhadap rencana pemindahan IKN. Dalam kajian yang dilakukan oleh Bappenas RI terdapat hal yang menjadi latar belakang pemindahan ibu kota dari pulau Jawa yaitu kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, daya dukung di Pulau Jawa yang sudah sangat berat meliputi krisis air bersih di pulau Jawa, besarnya konversi lahan yang terjadi, dan penurunan permukaan tanah sebanyak 7,5 cm per tahun akibat dari maraknya penyedotan air tanah (BAPPENASRI, 2019).

Pada 18 Januari 2022, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN telah disepakati dalam rapat paripurna DPR RI oleh hampir seluruh fraksi (DPR RI, 2022). Hal tersebut telah didasari oleh Pasal 360 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Kementerian Sekretariat Negara.). Naskah Akademik Ibu Kota Negara menjelaskan bahwa Kawasan Khusus Ibu Kota Negara akan berlokasi di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (DPR RI, 2021). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Moarfa memastikan bahwa lokasi tersebut akan menjadi titik nol yang terletak tepat berada di tengah Negara Republik Indonesia. Kini dengan diresmikannya Undang-Undang (UU), rencana pemindahan ibu kota negara makin nyata dan dilindungi oleh payung hukum.

Meskipun telah disepakati dan beberapa persiapan sudah dilakukan, kebijakan pemindahan ibu kota ini masih menuai kontroversi yang diwarnai dengan suara penolakan yang tak kunjung reda. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menjadi satu satunya fraksi partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, PKS menilai pemindahan ibu kota negara tidak tepat disaat kondisi negara yang sedang kesulitan membenahi keuangan negara yang terdampak pandemi dan pembahasan RUU IKN dirasa terburu-buru (dpr.go.id, 2022). Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur pun turut memberikan suara penolakan terhadap pemindahan IKN dengan menilai RUU Ibu Kota Negara yang telah disahkan cacat secara procedural dan dianggap sebagai bentuk ancaman keselamatan ruang hidup rakyat dikarenakan berpotensi akan menggusur lahan masyarakat adat hingga satwa langka yang berada di Kalimantan Timur (detikNews, 2022).

Di tengah masa pandemi Covid-19, rencana pemindahan IKN dinilai bukan sesuatu yang mendesak. Anggaran dana yang diperhitungkan oleh pemerintah guna mendanai pemindahan ibu kota, dianggap kurang bijak dalam kondisi negara yang sedang terdampak oleh pandemi Covid-19. Tidak sedikit kalangan termasuk tokoh nasional turut mengutarakan bentuk penolakan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dengan dana fantastis karena dinilai dana tersebut dapat dialokasikan untuk menunjang pemulihan dampak ekonomi pada pandemi Covid-19 yang terjadi. Salah satu bentuk penolakan yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah Petisi

Penolakan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara yang dilakukan secara dalam jaringan (daring), dikarenakan petisi ini berasal bukan dari masyarakat biasa akan tetapi digagas oleh para tokoh nasional yang dianggap merupakan kalangan masyarakat berpendidikan tinggi dan cerdas.

Narasi Institute bersama dengan 45 insiator, menggagas sebuah petisi *online* pada laman *change.org*. Petisi dalam rangka menolak pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ini bertajuk “*Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota!*”. Disamping isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) memang sedang hangat diperbincangkan, petisi ini menarik lebih banyak perhatian masyarakat karena para inisiatornya merupakan tokoh-tokoh ternama di Indonesia yang memiliki keahlian pada bidangnya masing-masing. Beberapa diantaranya adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Mouqoddas, Ekonom dan Politisi senior Indonesia Faisal Basri, hingga pensiunan TNI Mayor Jenderal Purnawiranan Dedy Budiman. Para inisiator melalui petisi ini, mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan dukungan gerakan menolak pemindahan IKN Nusantara. Ada pun petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, DPD RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan utama yang menjadi latar belakang para inisiator menggagas petisi penolakan tersebut adalah pemindahan ibu kota ditengah pandemi Covid-19 dianggap tidak tepat dan tidak memiliki urgensi.

Gambar 1. Petisi Penolakan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Baru



Sumber : (Change.org, 2022)

Petisi bertajuk “Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota!” menarik atensi masyarakat untuk memperoleh informasi, hal ini pun sejalan dengan kesigapan media pemberitaan *online* yang turut memproduksi beritanya terkait dengan petisi tersebut. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat menjadi hal yang penting dalam perkembangan media massa. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemberitaan media *online* digemari oleh masyarakat karena kemudahan akses yang diberikan untuk dapat memenuhi kebutuhan perkembangan informasi hingga kabar terkini.

Banyak media yang turut ikut serta dalam menyebarkan informasi mengenai Petisi Tolak Pemindahan IKN, telah menjadi salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai media pemberitaan *online*, termasuk diantaranya Kompas.com dan Detik.com. Kedua media tersebut merupakan media yang paling terlihat aktif dalam memproduksi pemberitaan terkait petisi penolakan pemindahan IKN dibandingkan media pemberitaan *online* lainnya. Pada 5 Februari 2022, tepat satu hari setelah petisi penolakan dimuat pada laman *change.org*, media Kompas.com

dan Detik.com turut memberitakan isu tersebut. Pada kanal pemberitaan milik Kompas.com dimuat berita dengan tajuk “Eks Pimpinan KPK dan 44 Tokoh Nasional Galang Petisi Tolak IKN Nusantara” (Kompas.com, 2022), sedangkan Detik.com memuat pemberitaan dengan tajuk “Faisal Basri-Eks Bos KPK Bikin Petisi Tolak Pindah Ibu Kota” (detik.com, 2022). Pada bulan Februari, yakni saat petisi penolakan muncul, Kompas.com memproduksi 45 berita terkait pemindahan IKN dan Detik.com juga memproduksi pemberitaan sebanyak 31 tajukberita. Kedua portal berita tersebut konsisten dalam memberikan informasi seputarperkembangan pemindahan ibu kota negara.

Dengan adanya kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi secara daring, sebuah berita tentu akan dengan cepat tersebar luas di masyarakat. Hal ini menjadikan para portal pemberitaan *online* berlomba-lomba agar dapat dengan cepat memberitakan sebuah isu atau kabar terkini dari setiap fenomena yang sedang menjadi perbincangan agar dapat menjadi pilihan utama dan dikunjungi oleh khalayak.

Kompas.com dan Detik.com menduduki peringkat teratas sebagai portal pemberitaan *online* di Indonesia yang paling banyak dikonsumsi oleh khalayak pada tahun 2022, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Similiarweb dan Semrush yang merupakan perusahaan penyedia layanan analisis serta peringkat *online* sebuah laman (Semrush, 2022; similiarweb.com.). Hal ini menunjukkan bahwa media pemberitaan *online* Kompas.com dan Detik.com telah memperoleh kepercayaan mayoritas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi dan akhirnya memiliki peranan kuat dalam membentuk persepsi masyarakat dalam memahami suatu fenomena yang terjadi melalui pemberitaan yang diproduksi.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi inti permasalahan, yaitu bagaimana Kompas.com dan Detik.com mengkonstruksi pesan mengenai pemberitaan petisi penolakan pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang digagas oleh 45 inisiator selama periode 5 – 10 Februari 2022?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kompas.com dan Detik.com mengkonstruksi pesan mengenai pemberitaan petisi penolakan pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang digagas oleh 45 inisiator selama periode 5 – 10 Februari 2022.

LANDASAN TEORI

Konstruksi Realitas Sosial

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman (Eriyanto, 2002). Menurut Berger dan Luckman paradigma ini penting sebagai salah satu sudut pandang dalam melihat gejala sosial atau realitas sosial. Paradigma konstruktivis merupakan paradigma dalam komunikasi yang berpandangan bahwa realitas sosial memiliki sifat yang relatif atau realitas yang adalah hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial menurut pandangan konstruktivis merupakan hasil dari konstruksi manusia, hasil proses budaya, termasuk penggunaan bahasa (Eriyanto, 2002).

Paradigma konstruktivis menjadi salah satu sudut pandang yang digunakan dalam mengamati sebuah gejala sosial atau realitas sosial di kehidupan masyarakat. Kemudian paradigma konstruktivis yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Luckman dikenal dengan teori konstruksi realitas sosial atau teori dialektika. Dalam proses merumuskan teorinya, Peter L. Berger dan Luckman memperoleh masukan pemikiran dari beberapa ahli diantaranya adalah Alfred Schutz (Teori Fenomenologi), Emile Durkheim (Teori Fakta Sosial), Max Weber (Teori Perubahan Sosial), George Herbert Mead (Teori Interaksionisme Simbolik). Namun, sebagian besar pendekatan ini memiliki asumsi yang sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Berger dan Luckman besar dipengaruhi oleh pemikiran para ahli sebelumnya. Teori Konstruksi Sosial (Santoso, 2016) memiliki beberapa asumsi dasar:

1. Proses konstruksi sosial atas dunia sosial yang diciptakan oleh manusia kreatif merupakan sebuah realitas.
2. Korelasi pemikiran manusia dan konteks sosial dimana pemikiran itu timbul, memiliki sifat yang berkembang dan dapat dilembagakan.
3. Konstruksi kehidupan masyarakat terjadi secara terus menerus.
4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas dimaknai sebagai kualitas yang terdapat dalam kenyataan yang telah diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tak bergantung kepada kehendak individu sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai suatu kepastian bahwa realitas bersifat nyata (*real*) serta memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dalam Eriyanto (2002) menyatakan bahwa realitas bukan dibentuk secara ilmiah, atau diturunkan oleh Tuhan. Namun sebaliknya, realitas adalah sesuatu yang dibentuk dan dikonstruksikan. Pada kenyataannya, realitas sosial tidak mampu berdiri sendiri tanpa peran dari seorang individu. Individu melakukan proses konstruksias realitas dalam pemahamannya yang selanjutnya realitas tersebut disempurnakan kedalam lingkup sosial berdasarkan subjektivitasnya. Oleh karena itu, konstruktivisme dilihat sebagai proses dan hasil dari kognitif individu dalam melakukan interpretasi terhadap dunia realitas yang ada. Berger dan Luckman dalam Eriyanto (2002) juga menjelaskan bahwa konstruksi realitas sosial terjadi secara simultan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Eksternalisasi adalah pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia baik secara mental atau dalam bentuk fisik kegiatan. Hal ini telah menjadi ciri manusia yang akan terus mencermati dalam aktivitas sehari-hari melalui proses berhubungan dengan dunia luar atau kenyataan.
2. Objektivasi adalah hasil (mental atau fisik) dari kegiatan eksternalisasi manusia.
3. Proses pencapaian tujuan mengubah orang menjadi realitas yang unik. Terjadi interaksi sosial dalam dunia intersubjektif atau antar individu. Hasil dari eksternalisasi merupakan kenyataan yang obyektif
4. Internalisasi adalah proses kembali ke realitas objektif agar realitas subjektif individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Berbagai aspek dunia yang telah dinilai secara objektif akan disebut sebagai bukti realitas semakin berkurang. Manusia menjadi produk masyarakat melalui internalisasi.

Berger dan Luckman dalam Eriyanto (2002) mengatakan terciptanya institusi masyarakat adalah melalui interaksi manusia, demikian juga bagaimana institusi tersebut bertahan. Realitas tidak terbentuk secara ilmiah namun dibentuk atau dikonstruksi. Semua orang bisa memiliki konstruksi realitas yang berbeda, setiap individu yang mempunyai pengalaman, preferensi, serta lingkungan sosial tertentu akan memiliki sudut pandang berbeda berdasarkan dengan proses konstruksinya masing-masing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realitas bersifat plural.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam Eriyanto (2002) juga menjelaskan bahwa substansi dari teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas merupakan proses simultan yang terjadi melalui tiga tahap yaitu, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi serta melalui bahasa. Tumpuan dan pendekatan dari teori ini adalah masyarakat transisi modern di Amerika pada sekitar tahun 1960an, pada saat itu media massa belum menjadi sebuah fenomena yang banyak dibicarakan. Dengan demikian, teori Konstruksi sosial atas realitas milik Peter L. Berger dan Thomas Luckman tidak memasukkan fenomena media massa sebagai variabel yang memiliki pengaruh dalam konstruksi sosial realitas.

Berita sebagai Konstruksi Realitas Sosial

Berita merupakan produk akhir dari proses kompleks yang dilakukan dalam berbagai rangkaian, termasuk pemilihan dan penetapan peristiwa serta topik tertentu (Eriyanto, 2002).

Dalam bukunya yang berjudul *Making News* (Tuchman, 1978), Tuchman menyatakan: “Ketika sampai pada tindakan membuat berita, itu bukannya tindakan membuat berita, melainkan tindakan mengkonstruksi realitas”.

Setiap jurnalis memiliki perspektif yang berbeda dalam mempresepsikan suatu fenomena, hal inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang dari proses mengkonstruksi realitas dalam konteks berita. Realitas merupakan hasil dari pemahaman antara jurnalis atas fakta. Hasil pandangan seorang jurnalis yang kini dijadikan sebagai alat dalam membangun sebuah berita. Menurut paradigmatkonstruktivis, fakta atau keyakinan adalah hasil pemahaman jurnalis penulis berita. Jurnalis atau wartawan dianggap berperan sebagai agen yang melakukan realitas karena setiap proses dan hasil atas berita selalu subjektif (Eriyanto, 2002). Maka dengan demikian setiap pemberitaan pasti memiliki letak perbedaan, meskipun peristiwa ya diberitakan sama.

Jurnalis atau wartawan dalam membuat berita melalui proses internalisasi dimana pada saat ini wartawan dihadapkan dengan realitas. Kemudian realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Selama proses eksternalisasi wartawan memaknai realitas secara mendalam. Pada tahap ini wartawan mencoba menggunakan pemahamannya terkait fakta untuk melihat realitas yang ada. Hasil dari berita merupakan produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut (Eriyanto, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi sebuah wacana model Zhongdang Pan dan Kosicki. Untuk melakukan penelitian, instrumen pendukung berupa komputer digunakan Peneliti untuk mengakses situs web resmi dari Kompas.com dan Detik.com. Tahap analisis data menggunakan model tersebut akan terbagi ke dalam beberapa langkah. Pada mulanya peneliti akan mengumpulkan data berupa teks artikel beritaterkait fenomena Petisi Penolakan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Baru dari portal berita resmi milik Kompas.com dan Detik.com. Kemudian, peneliti akan menerapkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing* milik Zhongdang Pan dan Kosicki, yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Pertama, peneliti akan mengamati berita dari sisi bagaimana wartawan menyusun sebuah fakta (sintaksis). Dalam hal ini peneliti akan memisahkan berita berdasarkan *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup. Langkah kedua, peneliti akan mencermati unsur skrip dari teks berita berdasarkan kelengkapan unsur berita yang meliputi unsur 5W + 1H. Kemudian pada langkah ketiga, peneliti mengamati struktur tematik dalam berita dengan melakukan analisis hubungan antar paragraf sehingga dapat diketahui tema yang ditekankan. Terakhir peneliti akan melakukan analisis teks berita dari sisi retorik, dengan mengamati detail penggunaan foto, grafis, idiom, grafik, dan pemilihan kata yang digunakan dalam berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Pada penelitian ini, akan dibahas *framing* pada masing-masing berita yang membahas Petisi Penolakan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Baru yang diproduksi oleh Kompas.com dan Detik.com. Untuk mengetahui dan memahami *framing* yang digunakan oleh kedua media, perlu dilakukan serangkaian proses analisis *framing*. Maka, peneliti menggunakan model analisis *framing* milik Zhongdang Pan dan Kosicki yang terdiri dari 4 dimensi struktur teks berita sebagai perangkat *framing*, yaitu: Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retorik. Kemudian, peneliti akan melakukan penafsiran setelah mengkaji hasil data yang didapatkan dari keempat dimensi dalam bentuk narasi.

KOMPAS.COM (6 Februari 2022)

Dalam berita yang ditayangkan dua hari setelah Petisi Tolak Pemindahan dan Pembangunan IKN muncul di laman change.org pada Jumat, 4 Februari 2022. Kompas.com mengangkat berita terkait petisi tersebut. Ada pun latar pada berita ini adalah muncul petisi menolak pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara oleh 45 inisiator yang merupakan tokoh nasional. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini, Kompas.com menggunakan isi dari petisi menolak IKN sebagai informasi utama dalam penulisan berita serta mengutip keterangan tertulis dari Busyro Muqoddas yang merupakan Mantan Ketua KPK. Wartawan menutup berita dengan menegaskan perihal ekonomi keuangan negara yang bertujuan agar pembangunan IKN dapat dipertimbangkan dengan baik

Kemudian dari sisi skrip, berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H. Ada pun hal yang paling ditekankan pada berita ini adalah aspek dari alasan yang menjadi latar belakang petisi penolakan IKN oleh 45 inisiator. Isi dari berita yang disusun oleh Kompas.com bertema 45 inisiator petisi tolak IKN menilai pemindahan dan pembangunan IKN ditengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat. Selain itu dari sisi pemilihan kata untuk menekankan fakta, Kompas.com menggunakan kata “tolak” pada judul yang ditujukan dalam menanggapi adanya rencana pemindahan IKN. Selain itu, Kompas.com pun memuat pernyataan dari Busyro Muqoddas yang mengatakan “**rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan**” dalam proses-proses politik pengesahan Undang-Undang IKN”. Dalam hal ini penggunaan frasa *rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan* untuk menekankan bahwa rakyat tidak dilibatkan dan hal tersebut sebagai salah satu bentuk penghinaan terhadap rakyat. Pada berita ini Kompas.com menggunakan foto berupa ilustrasi ibu kota negara.

7 Februari 2022

Dalam berita yang ditayangkan pada 7 Februari 2022 ini, Kompas.com kembali mengangkat berita terkait petisi tolak IKN. Penggunaan judul dalam pemberitaan Kompas.com kali ini memperlihatkan pandangan dari Kompas.com terkait bagaimana penolakan pemindahan Ibu Kota Negara menjadi suatu hal yang secara tidak langsung disetujui oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Latar dari berita ini adalah rencana pemerintah memulai pembangunan megaprojek IKN. Kompas.com menggunakan 3 narasumber yang merupakan pihak-pihak yang turut menolak pemindahan ibu kota negara, yaitu M. Busyro Muqoddas, Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), dan Koalisi Masyarakat Sipil serta mengutip beberapa pernyataan dari isi petisi penolakan. Kemudian pada akhir berita, wartawan menutup berita dengan menekankan ketidaksetujuan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pembangunan IKN karena dinilai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan menciptakan masalah baru.

Berita ini memenuhi unsur 5W+1H untuk dapat di golongkan menjadi berita yang lengkap. Dalam isi berita kali ini Kompas.com memuat nama dari siapa saja pihak yang memberikan dukungan terhadap penolakan pemindahan ibu kota negara, lengkap dengan penjelasan alasan penolakan dari setiap pihak serta bagaimana setiap pihak menunjukkan aksi penolakan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara. Isi dari berita yang disusun oleh Kompas.com bertema bentuk ketidaksetujuan kelompok tertentu terhadap pemindahan dan pembangunan IKN. Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat terlihat dari pemilihan kata yang digunakan serta ilustrasi foto yang dicantumkan. Dalam teks berita tersebut, didapati bahwa Kompas.com menggunakan beberapa frasa dan kata dalam menekankan sebuah fakta. Penggunaan kata “oligarki” dalam frasa megaprojek oligarki yang mengancam keselamatan rakyat. Adapun makna dari kata “oligarki” sesuai dengan KBBI adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Maka frasa tersebut menunjukkan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa rencana pemindahan dan pembangunan IKN bukanlah untuk kepentingan bersama melainkan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Selain itu, didapati juga penggunaan frasa *menghapus dosa* oleh Koalisi Masyarakat Sipil dalam menekankan penilaian terhadap rencana pemindahan IKN yang

akan didirikan dengan mengabaikan tanggungjawab untuk melakukan reklamsi serta pasca tambang yang seharusnya dilakukan oleh korporasi akan tetapi dialihkan menjadi tanggungjawab negara. Kemudian dalam menggambarkan situasi Jakarta serta segala permasalahan yang ada di dalamnya, Kompas.com menggunakan kata “ruwet” yang dalam KBBI memiliki makna kusut, kalut, sulit, dan rumit. Ilustrasi pemindahan ibu kota negara menjadi foto yang dipilih Kompas.com untuk dicantumkan dalam berita ini, akan tetapi foto tersebut kurang mendukung isi berita.

Kompas.com kembali mengangkat berita terkait petisi penolakan, dengan berfokus pada memberitakan alasan seorang narasumber yang merupakan salah satu insiator dalam petisi tolak IKN, yaitu Reza Indragiri Amriel. Pada judul yang digunakan oleh Kompas.com dalam berita ini, dapat terlihat bahwa Kompas.com menitik beratkan berita ini pada pandangan insiator dengan pertanyakan prioritas pemerintah, kemudian hal ini makin difokuskan terhadap pandangan dari seorang narasumber yaitu Reza Indragiri Amriel yang mengungkapkan alasannya menjadi salah satu insiator. Latar dari berita ini adalah insiator mempertanyakan prioritas pemerintah. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini, Kompas.com masih mengutip keterangan tertulis dari Bapak Busyro Muqoddas yang merupakan Mantan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengutip beberapa isi dari petisi penolakan, dan mengutip pernyataan dari Reza Indragiri Amriel sebagai pernyataan yang mendominasi isi pemberitaan. Pada bagian penutup dari berita ini, wartawan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat dengan mengutip dari petisi tolak IKN.

Jika di amati dari kelengkapan berita Kompas.com pada pemberitaan ini telah memenuhi unsur 5W+1H, sehingga dapat dikategorikan sebagai berita yang lengkap. Dalam isi berita kali ini hal yang dimuat lebih banyak adalah unsur *who* (siapa) Reza Indragiri Amriel dan *why* (kenapa) hal yang menjadi alasan dari Reza Indragiri Amriel dalam menggalang petisi penolakan. Reza Indragiri Amriel menjadi narasumber utamaterkait alasan yang melatarbelakangi ia menggalang petisi penolakan, maka wartawan menyusun berita dengan didominasi oleh kutipan pernyataan dari seorang Reza Indragiri Amriel. Hal tersebut dikemas dengan runtut serta setiap fakta yang dimuat dalam kalimat dan paragraph saling berkesinambungan satu sama lain. Ada pun beritayang disusun ini bertema menyampaikan informasi terkait alasan insiator galang petisitolak IKN.

Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat diamati dari pemilihan kata yang digunakan serta ilustrasi yang dicantumkan pada foto. Kompas.com mencantumkan “Pertanyakan Prioritas Pemerintah” pada judul yang mengandung makna kata cukup berani dan tajam dalam menyorot peristiwa yang ingin diangkat dalam pemberitaan. Dalam isi berita juga ditemukan beberapa kata yang digunakan dalam pernyataan dari Reza Indragiri Amriel yaitu “pertanyaan serius terkait *sense of priority* bahkan *sense of urgency* pemerintah dan DPR terkait pemindahan IKN” dalam hal ini jelas terlihat bagaimana Reza Indragiri Amriel mempertanyakan hingga terkesan sedikit meremehkan pemerintah dan DPR terkait pemindahan IKN. Menurut Reza, prioritas yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk memenuhi kesejahteraan dasar masyarakat. Selain itu pada berita ini, wartawan juga menggunakan ilustrasi foto berupa tangkapan layar gambar desain burung garuda, akan tetapi pemilihan foto yang digunakan kurang mendukung isi dari berita.

Dalam berita yang menjadi berita keempat terkait petisi tolak IKN yang ditayangkan oleh Kompas.com, judul yang digunakan oleh Kompas.com dalam berita ini, terlihat bahwa pemberitaan ini berfokus pada Prof. Dr. Azyumardi Azra seorang Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan merupakan salah satu dari insiator petisi tolak IKN. Latar dari berita ini adalah Pemindahan dan pembangunan ibu kota negara dinilai tidak tepat ditengah masa pandemi dan persoalan ekonomi. Kompas.com menggunakan Prof. Dr. Azyumardi sebagai narasumber utama dan pernyataan narasumber menjadi isi dari berita. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini. Pada bagian penutup wartawan menegaskan informasi terkait petisi tolak IKN yang telah ditandatangani oleh 11.773 orang.

Jika diamati berita ini tergolong lengkap karena telah menerapkan unsur 5W+1H dalam penulisan berita. Meskipun berita ini didominasi oleh pernyataan dari Prof. Dr. Azyumardi Azra yang secara tidak langsung menjadi isi dari pemberitaan inidn menjadi hal yang mempunyai bobot terpenting dari isi berita ini, akan tetapi wartawan dapat menyusun dengan urutan yang berkesinambungan antar kalimat dari setiap pernyataan Prof. Dr. Azyumardi Azra. Dalam berita ini wartawan menggunakanberagam pilihan kata yang cukup menarik dalam penekanan fakta yang ingin disampaikan. Terdapat beberapa frasa yang digunakan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra,yaitu proyek mercusuar, mangkrak, serta beberapa pernyataan yang mengandung makna cukup keras dan tajam yang dilontarkan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, yaitu:

- a. “Tidak ada kekuatan lain yang bisa membatalkan. Karena apa yang diminta PakJokowi pasti jadi.”
- b. “Jokowi hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri, nggak ada yang bisa menghalangi. Dalam mengutip berbagai pernyataan dari Prof. Dr. Azyumardi Azra sebagai isi yang dimuat dalam isi berita, memperlihatkan bahwa Kompas.com tak segan untuk menggunakan cara yang cukup keras dalam penekanan fakta berita. Selain itu pada berita ini, wartawan juga mencantumkan ilustrasi foto dari Prof. Dr. Azyumardi Azra.

8 Februari 2022

Secara garis besar dari unsur sintaksis, wartawan berfokus untuk membahas para pendukung dari Jokowi yang menolak rencana pemindahan ibu kota negara. Adapun latar dari berita ini adalah sebagian dari inisiator merupakan tokoh yang pernah mendukung Jokowi. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini, Kompas.com mengutip keterangan Prof. Dr. Azyumardi Azra (Guru Besar UIN SyarifHidayatullah Jakarta) yang mendominasi isi dari berita ini. Wartawan menutup berita dengan menginformasikan 13 nama dari inisiator petisi tolak IKN yang merupakan professor dan guru besar.

Jika dilihat dari kelengkapan berita Kompas.com tergolong lengkap dalam menerapkan unsur 5W+1H. Berita yang dimuat lebih banyak memberi penekanan padaunsur *who* (siapa) para tokoh yang pernah menjadi pendukung bagi Jokowi hingga menjadi bagian dari kaum yang turut tolak pemindahan dan pembangunan IKN dan *why* (kenapa) hal yang melatarbelakangi kekecewaan para tokoh, terutama dari sudut pandang Prof. Dr. Azyumardi Azra. Tema dari berita ini adalah para mantan pendukung menilai Jokowi banyak melakukan hal yang mencederai demokrasi sehingga membuat para tokoh besar yang tadinya mendukung Jokowi, berubah arah turut menjadi inisiator petisi tolak IKN.

Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat terlihat pemilihanhan kata yang digunakan serta foto yang dicantumkan. Kompas.com memilih untuk menggunakan frasa mencederai demokrasi, warisan buruk, beban sejarah serta menggunakan sebuah peribahasa "menggantung asap mengukir langit" yang memiliki makna sia-sia. Ilustrasi yang digunakan berupa foto dari Capres petahana Joko Widodo dan sang istri Iriana Jokowi mengacungkan jempoldi acara kampanye terbuka.

Isi dari pemberitaan kali ini berfokus pada Sufmi Dasco yang merupakan Pimpinan DPR, ada pun Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membuka ruang untuk publik memberikan aspirasi terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ada pun latar pada berita ini adalah munculnya petisi tolak pemindahan IKN. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini, Kompas.com mengutip pernyataan dari Sufmi Dasco yang merupakan Pimpinan DPR serta beberapa pernyataan dari isi petisi tolak IKN. Wartawan menutup berita dengan menegaskan terkait petisi menolak pemindahan dan pembangunan IKN.

Berita ini telah menerapkan unsur 5W+1H dengan baik dalam menuliskan isi.Berita yang dimuat lebih banyak memberi penekanan pada unsur “siapa”, Sufmi Dasco Ahmad dan unsur “kenapa” bahwa Politikus Partai Gerindra itu menilai, petisi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat yang dijamin kebebasannyaoleh konstitusi. Unsur tematik

pada berita ini yang dapat dilihat dari detail serta hubungan antar satu kalimat ke kalimat yang lain. Dimulai dari membahas terkait Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membuka ruang untuk publik memberikan aspirasi terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga paragraph yang memparkan pandangan dari Sufmi Dasco Ahmad petisi merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat yang dijamin kebebasannya oleh konstitusi. Tema dari berita ini adalah menyampaikan informasi terkait pendapat Sufmi Dasco Ahmad bahwa petisi merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat yang dijamin kebebasannya oleh konstitusi.

Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat terlihat pemilihan kata yang digunakan serta foto yang dicantumkan. Kompas.com memilih untuk memuat pernyataan dari Sufmi Dasco yang menggunakan frasa “mengakomodir kepentingan publik”, dalam penggunaan frasa tersebut tersirat bahwa Sufmi Dasco menekankan aspek demokrasi dalam proses rencana pemindahan pembangunan IKN guna memenuhi kebutuhan publik yang perlu diperhitungkan. Pada berita ini, Kompas.com juga menggunakan ilustrasi foto berupa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.

DETIK.COM

5 Februari 2022

Dalam berita yang ditayangkan satu hari setelah Petisi Tolak Pemindahan dan Pembangunan IKN muncul di laman change.org pada Jumat, 4 Februari 2022. detik.com mengangkat berita terkait petisi tolak IKN. Judul yang digunakan dalam pemberitaan ini nampak memperlihatkan pandangan portal media *online* detik.com mengenai terdapat sekelompok tokoh nasional yang menolak pemindahan ibu kota negara hingga membuat petisi penolakan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal yang menjadi latar belakang dari berita ini adalah adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini, detik.com hanya mengutip isi dari petisi penolakan IKN pada laman change.org. Wartawan menutup berita dengan menegaskan nama dari 45 tokoh nasional yang menjadi inisiator dari petisi tolak IKN.

Jika dilihat dari kelengkapan berita Kompas.com tergolong lengkap dalam menerapkan unsur 5W+1H. Berita yang dimuat lebih banyak memberi penekanan pada unsur *why* (siapa) 45 inisiator terkhusus, Faisal Basri dan Busyro Muqoddas. Unsur *why* (kenapa) alasan dari para inisiator bikin petisi penolakan pemindahan Ibu Kota Negara. Berita dimulai dengan pembahasan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara ditolak oleh sejumlah kalangan hingga muncul petisi penolakan pemindahan Ibu Kota Negara yang di gagas oleh 45 inisiator yang merupakan tokoh bangsadiantaranya adalah Faisal Basri seorang ekonom senior hingga Busyro Muqoddas seorang eks bos KPK. Selanjutnya isi berita dilanjutkan dengan beberapa kutipan dari petisi penolakan Ibu Kota Negara sebagai hal yang menjadi alasan, penilaian hingga harapan dibalik para inisiator membuat petisi penolakan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara. Tema dari berita ini adalah menyampaikan informasi terkait pemindahan Ibu Kota Negara di tengah situasi pandemic bukanlah hal yang tepat. Dari setiap rangkaian paragraph singkat ini mampu memberikan gambaran yang jelas dari tujuan yang ingin disampaikan, sebab inti pembahasan dari setiap paragraph yang terkandung pada tiap kalimat saling berkesinambungan satu dengan yang lain.

Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat dilihat dalam penggunaan kata “tolak” dari judul berita ini, Penggunaan kata “tolak” pada judul ditujukan dalam menanggapi adanya rencana pemindahan IKN. Kata dasar tolak dalam KBBI memiliki arti mendorong/mendesak. Maka pemilihan kata ini menyiratkan sebuah penekanan dari para inisiator. Hal lain yang ditekan oleh wartawan adalah dua nama tokoh bangsa yaitu Faisal Basri seorang ekonom senior dan Busyro Muqoddas seorang eks bos KPK yang turut menjadi inisiator dari petisi ini. Detik.com juga menggunakan ilustrasi berupa foto dari Faisal Basri yang dimuat padahalaman utama berita ini. hal ini Detik.com menyorot Faisal Basri selaku ekonom senior yang turut menjadi inisiator petisi.

Dalam berita yang ditayangkan satu hari setelah Petisi Tolak Pemindahan dan Pembangunan IKN, latar berita yang digunakan adalah munculnya petisi tolak pemindahan dan pembangunan IKN yang digalng oleh 45 inisiator tokoh nasional. Judul ini nampak memperlihatkan bahwa portal media *online* Detik.com berpandangan bahwa respon yang dilontarkan oleh Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) penting, sehingga Detik.com mengangkat respon beliau dalam berita yang diproduksinya terkait petisi penolakan pemindahan ibu kota negara. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini, Detik.com mengutip respon dari Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang menjadi unsur penting dan utama dalam isi pemberitaan. Wartawan menutup isi beritadengan mengutip petisi tolak IKN dari change.org untuk mengaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara di tengah situasi pandemi Covid-19 bukanlah hal yang tepat

Jika dilihat dari kelengkapan berita Detik.com tergolong lengkap dalam menerapkan unsur 5W+1H. Berita yang dimuat lebih banyak memberi penekanan pada unsur *who* (siapa) Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) dan *why* (kenapa) respon yang diberikan oleh Ali Mochtar Ngabalin dalam menanggapi petisi penolakan ibu kota negara. Penjelasan dari sudut tematik yang merupakan cara wartawan menuliskan fakta. Tema dari berita ini adalah menyampaikan informasi terkait respon Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) terhadap adanya petisi tolak IKN. Secara keseluruhan kalimat yang satu dengan yang lain dalam berita ini cukup berkesinambungan, penyusunan berita selalu dimulai dengan informasi terkait Faisal Basri Cs menggalang petisi tolak IKN, kemudian dilanjutkan dengan paragraph yang menginformasikan bahwa Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan respon terhadap petisi penolakan IKN, selanjutnya wartawan memaparkan segala respon yang dilontarkan oleh Ali Mochtar Ngabalin, dan pada akhir paragraph wartawan kembali memuat informasi terkait petisi penolakan menjadi informasi penutup dari berita ini.

Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat terlihat pada pernyataan yang digunakan serta foto yang dicantumkan. Detik.com memuat pernyataan dari Ali Mochtar Ngabalin terkait tanggapannya terhadap adanya petisi tolak pemindahan IKN, menurut Ali Mochtar Ngabalin rencanapemindahan ibu kota ini adalah untuk kepentingan masa depan Indonesia, beliau mengatakan " Sehingga kalau Presiden Jokowi menyebut pembangunan Indonesia sentris, maka pembangunan IKN itu bukan Jawa Sentris.". Mengacu pada tanggapan Ali Mochtar Ngabalin, menyiratkan maksud bahwa rencana pemindahan IKN merupakan suatu hal yang baik bagi masa depan bangsa Indonesia. Pada berita ini, Kompas.com juga menggunakan ilustrasi foto berupa ilustrasi Pulau Kalimantanmenunjukkan Ibu Kota Baru.

9 Februari 2022

Latar berita yang tayang pada 9 Februari 2022 adalah jumlah penandatanganan petisi tolak IKN terus bertambah. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam beritaini, detik.com menggunakan narasumber tunggal yaitu Trubus Rahardiansyah selaku pengamat kebijakan publik, serta mengutip beberapa pernyataan dari petisi penolakan. Wartawan menutup berita dengan mengutip pernyataan Trubus Rahardiansyah untuk menegaskan bahwa petisi tolak IKN memprovokasi serta jadi mendorong orang lain untuk tidak menyetujui dan itu memberikan pendidikan yang tak baik. Jika dilihat dari kelengkapan berita detik.com tergolong lengkap dalam menerapkan unsur 5W+1H. Tema dari berita ini adalah menyampaikan bahwa pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara ditengah masa pandemi Covid-19 tidak memiliki urgensi

Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat terlihat pemilihan kata yang digunakan serta foto yang dicantumkan. Detik.com memilih untuk memuat tanggapan dari Trubus Rahardiansyah yang memandang bahwa petisi tolak IKN merupakan sebagai indakan yang menghasut sertamembangkitkan kemarahan yang memberikan

pendidikan tak baik. Kemudian pada berita kali ini detik.com hanya menggunakan narasumber tunggal yaitu Trubus Rahardiansyah selaku pengamat kebijakan publik, serta mengutip beberapa pernyataan dari isi petisi tolak IKN. Pada berita ini, detik.com juga menggunakan ilustrasi foto berupa Ilustrasi kantor presiden di Ibu Kota Negara Nusantara.

10 Februari 2022

Latar dari berita yang diterbitkan oleh Detik.com kali ini adalah muncul petisidukungan terhadap pemindahn IKN. Dalam pemilihan narasumber dan kutipan dalam berita ini, detik.com memilih dua narasumber yaitu Prof Sulfikar Amir PhD selaku Guru Besar Nanyang Technological University (NTU), Singapura dan Presiden Joko Widodo serta mengutip beberapa pernyataan dari petisi dukung pemindahan Ibu Kota Negara. Wartawan menutup berita dengan mengutip pernyataan Presiden Jokowi untuk menegaskan bahwa IKN di Kalimantan Timur menjadi percontohan dalam transformasi di berbagai sektor, salah satunya terkait tata sosial yang toleran dan mendorong pembangunan ekonomi hijau

Jika dilihat dari kelengkapan berita detik.com tergolong lengkap dalam menerapkan unsur 5W+1H. Tema dari berita kali ini adalah menyampaikan informasi terkait petisi dukungan terhadap pemindahan IKN dan pandangan serta alasan Presiden Jokowi terhadap pemindahan Ibu Kota Negara Baru. Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat terlihat pemilihan kata yang digunakan serta foto yang dicantumkan. Detik.com memilih untuk memuat pernyataan Sulfikar Amir yang menggunakan kata “brutal” dalam menilai proses rencana pemindahan dan pembangunan IKN, Sulfikar Amir memandang bahwa rencana pemindahan IKN yang mengacu pada naskah akademik IKN merupakan sebuah perilaku yang sifatnya kejam. Menurut beliau, proses yang dilakukan tidak memperhatikan faktor yang sangat penting dalam menghasilkan suatu keputusan dan kebijakan yang berdampak luas. Pada berita ini, detik.com juga menggunakan ilustrasi foto berupa ilustrasi kantor presiden di Ibu Kota Baru.

Pada berita yang ditayangkan pada 10 Februari 2022, latar yang digunakan Hidayat Nur Wahid selaku wakil ketua MPR dukung petisi tolak IKN. Dalam penggunaan kutipan dan sumber dalam berita ini, detik.com hanya menggunakan narasumber tunggal yaitu Hidayat Nur Wahid selaku Wakil ketua MPR. Wartawan menutup berita dengan menegaskan informasi terkait petisi penolakan pemindahan IKN yang telah ditandatangani oleh hamper 24.500 warga dan menjadi petisi dengan penandatanganan terbanyak di laman change.org.

Jika dilihat dari kelengkapan berita detik.com tergolong lengkap dalam menerapkan unsur 5W+1H. Tema dari berita ini adalah menyampaikan informasi terkait pandangan HNW terhadap persetujuan UU IKN dan urgensi dari pemindahan Ibu Kota Negara di tengah masa pandemi Covid-19. Sedangkan cara penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dalam berita ini dapat terlihat pemilihan kata yang digunakan serta foto yang dicantumkan. Detik.com memilih untuk memuat pernyataan HNW terkait asas prioritas terhadap rencana pemindahan IKN. Pada berita ini, detik.com juga menggunakan ilustrasi berupa foto dari Hidayat Nur Wahid (HNW).

B. Pembahasan

Pada tanggal 4 Februari 2022, Narasi Institute bersama dengan 45 inisiator, menggagas sebuah petisi *online* pada laman *change.org*. Petisi dalam rangka menolak pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ini bertajuk “*Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota!*”. Para inisiator yang merupakan tokoh nasional bangsa diantaranya adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Mouqoddas, Ekonom dan Politisi senior Indonesia Faisal Basri, hingga pensiunan TNI Mayor Jenderal Purnawiranan Dedy Budiman. Alasan utama dari para inisiator menggagas petisi penolakan tersebut adalah pemindahan ibu kota ditengah pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat dan tidak memiliki urgensi. Melalui petisi penolakan tersebut para inisiator mengajak masyarakat untuk turut serta

memberikan dukungan terhadap gerakan menolak pemindahan IKN Nusantara. Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, DPD RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Penelitian ini melakukan analisis *framing* terhadap berita seputar Petisi Menolak Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara, selama tanggal 5-10 Februari 2022 pada media *online* Kompas.com dan Detik.com. Pada sub bab sebelumnya, penggunaan *framing* pada setiap berita dijabarkan, serta dijelaskan pesan dan aspek utama utama yang ditonjolkan pada berita. Kemudian, pada sub bab ini akan dibahas hasil dari analisis *framing* tersebut. Untuk menjelaskan hasil dari analisis *framing* yang telah dilakukan, peneliti mengkompilasikan semua penemuan karakteristik umum pada berita Kompas.com dan Detik.com yang sudah dianalisis. Tabel berikut menjabarkan karakteristik-karakteristik tersebut.

Tabel 1. Perbandingan *Framing* Berita Pada Kompas.com dan Detik.com

Kompas.com	Detik.com
Dari sisi judul yang digunakan cenderung menyerang pemerintah terkait adanya rencana pemindahan IKN	Judul yang digunakan lebih bersikap netral
Berusaha mengungkap pandangan dari para tokoh yang sebelumnya merupakan pro Jokowi sebagai narasumber yang dipilih, dengan membahas pernyataan-pernyataan para tokoh terkait petisi penolakan IKN	Lebih berfokus dalam menayangkan perkembangan dari petisi penolakan IKN dengan pemilihan narasumber beragam
Menilik lebih dalam dari aspek kinerja Presiden Jokowi yang dinilai mengecewakan pada periode kepemimpinan kedua ini terutama dengan adanya rencana pemindahan IKN	Menyorot pernyataan Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang berpandangan bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Jokowi memang tak akan bisa menyenangkan semua pihak
Juga membahas informasi terkait pihak yang turut mendukung petisi tolak IKN	Memuat informasi terkait adanya petisi dukung pemindahan dan pembangunan IKN
Dalam membahas persoalan ekonomi yang menjadi alasan utama dibalik petisi penolakan Kompas.com menekankan bahwa dengan anggaran yang besar proyek ini akan menjadi proyek mercusuar jika diteruskan serta memiliki potensi berakhir mangkrak jika dipaksakan	Dalam membahas persoalan ekonomi yang menjadi alasan utama dibalik petisi penolakan detik.com menekankan bahwa lebih bagus anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi
Memilih untuk memuat pernyataan dari Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil DPR bahwa Petisi Penolakan terhadap IKN pemerintah diharapkan membuka ruang aspirasi publik untuk menekankan aspek demokrasi dalam proses pemindahan IKN	Memilih untuk memuat pernyataan dari seorang pengamat kebijakan publik yaitu Trubus Rahardiansyah bahwa petisi penolakan terhadap IKN dapat memberikan pendidikan yang tak baik untuk menekankan sisi buruk dari adanya petisi tolak IKN yang dinilai memprovokasi
Menggambarkan pemerintahan Jokowi yang mengalami kemunduran demokrasi dan digantikan oligarki politik	Menggambarkan pernyataan Presiden Jokowi terkait rencana pemindahan IKN untuk kepentingan masa depan Indonesia

Sumber: Olahan Peneliti

Kompas.com dalam memberitakan fenomena Petisi Menolak Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara, memiliki karakteristik *framing* berikut. Pertama dalam penentuan judul dari setiap berita yang ditayangkan oleh Kompas.com secara tidak langsung memberikan kesan menyerang pemerintah terkait adanya rencana pemindahan IKN. Kompas.com secara berani

memilih kata yang cukup keras sebagai cara untuk menekankan fakta dalam judul berita yang diproduksi. Selain itu, setiap judul yang digunakan oleh Kompas.com pada setiap pemberitaan yang diterbitkan mampu memberikan gambaran isi dari berita secara apik.

Kedua, secara garis besar latar informasi yang digunakan oleh Kompas.com dalam memproduksi berita terkait petisi penolakan IKN adalah berusaha mengungkap sisi lain dari Presiden Jokowi melalui pandangan dari para tokoh yang sebelumnya merupakan pro Jokowi namun sekarang justru berganti haluan dengan turut menjadi pendukung hingga inisiator dari petisi tolak IKN. Dalam hal ini Kompas.com menggunakan para tokoh tersebut sebagai narasumber yang dipilih oleh Kompas.com dengan membahas pernyataan-pernyataan para tokoh terkait petisi penolakan IKN sebagai info yang mempunyai peranan penting dalam setiap pemberitaan. Dengan memilih untuk menggunakan pandangan dari para tokoh yang sebelumnya merupakan pro Jokowi namun kini berbalik mengkritisi bahkan terkesan menyerang masa pemerintahan Presiden Jokowi, hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan sisi keberpihakan dari media Kompas.com dalam memproduksi berita terkait adanya petisi penolakan pemindahan IKN.

Ketiga, dengan adanya rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang direalisasikan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam memproduksi berita terkait petisi tolak IKN, Kompas.com menilik lebih dalam dari aspek kinerja Presiden Jokowi yang dinilai mengecewakan pada periode kepemimpinan kedua ini terutama dengan adanya rencana pemindahan IKN. Kompas.com secara terang-terangan membahas terkait pandangan para mantan Pro- Jokowi terhadap adanya pemindahan ibu kota negara. Dalam berita yang berjudul “Asa Para Tokoh yang Pernah Dukung Jokowi Tangkis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara”, dengan berita ini dapat dilihat bahwa Kompas.com menyorot pemerintahan Jokowi di periode kedua masa kepemimpinannya mulai mengalami kemunduran demokrasi dan digantikan oleh oligarki politik

Keempat, hanya membahas dan memaparkan informasi seputar petisi tolak IKN dan pihak yang turut mendukung petisi tolak IKN. Kompas.com hanya berfokus untuk memproduksi pemberitaan terkait petisi tolak IKN dan lebih menekankan pada alasan yang menjadi latar belakang dari para inisiator menggalang petisi penolakan terhadap pemindahan IKN.

Kelima, memilih untuk menggunakan sudut pandang dari seorang inisiator yaitu Prof. Dr. Azyumardi Azra dalam membahas terkait persoalan ekonomi yang menjadi salah satu alasan utama dibalik adanya petisi penolakan terhadap IKN. Kompas.com menekankan bahwa dengan anggaran yang besar proyek ini akan menjadi proyek mercusuar jika diteruskan serta memiliki potensi berakhir mangkrak jika dipaksakan untuk terus dijalankan.

Keenam, menyorot aspek demokrasi sebagai hal yang tercederai. Kompas.com memilih untuk memuat pernyataan dari Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil DPR yang menyatakan bahwa dengan adanya Petisi Penolakan terhadap IKN pemerintah diharapkan membuka ruang aspirasi publik untuk menekankan aspek demokrasi dalam proses pemindahan IKN.

Ketujuh, Menggambarkan pemerintahan Jokowi yang mengalami kemunduran demokrasi dan digantikan oligarki politik. Kompas.com menekankan aspek kemunduran demokrasi dalam isi pemberitaan terkait dengan adanya rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Kemudian, Kompas.com didapati konsisten dalam menyorot pernyataan dari seorang Busyro Muqoddas selaku mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempersoalkan UU IKN yang baru saja disahkan. Ada pun isi pernyataan tersebut mengaitkan antara rakyat sebagai pemegang daulat yang dihinakan dalam proses politik pengesahan UU IKN. Pernyataan tersebut konsisten digunakan pada tiga pemberitaan terkait petisi tolak IKN yang diproduksi oleh Kompas.com. Pernyataan yang dilayangkan oleh Busyro Muqoddas tersebut dipandang suatu hal yang penting oleh Kompas.com, yang kemudian mampu memperlihatkan makna tersirat bahwa Kompas.com memiliki pandangan yang serupa.

Di sisi lain, terdapat Detik.com yang memosisikan diri untuk cenderung netral tanpa memihak kepada pihak tertentu dalam memproduksi pemberitaan terkait adanya petisi menolak

pemindahan dan pembangunan IKN. Hal ini dapat diamati dari bagaimana detik.com menentukan judul yang digunakan dalam setiap berita terkait petisi penolakan IKN. Detik.com tidak menggunakan kata yang mengandung makna tersirat atau menggiring opini pembaca secara berlebihan.

Kedua, berbeda dengan Kompas yang cenderung menggunakan narasumber yang pro terhadap petisi menolak pemindahan dan pembangunan ibu kota negara.

Detik.com menggunakan narasumber yang beragam dalam memproduksi pemberitaan terkait adanya petisi penolakan terhadap IKN, dengan menghadirkan sudut pandang dari kedua belah pihak yang mendukung dan yang menolak.

Ketiga, Detik.com menyorot pernyataan Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang berpandangan bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Jokowi memang tak akan bisa menyenangkan semua pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa detik.com tidak berusaha untuk menyerang pemerintah terkait adanya rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara, dengan memproduksi berita terkait respon KSP yang terkesan membela pemerintah.

Keempat, salah satu hal yang sangat membedakan pemberitaan yang diproduksi antara Kompas.com dan Detik.com yaitu adanya pembahasan yang dikemas dalam satu pemberitaan terkait dengan munculnya petisi dukungan terhadap pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang dimuat oleh Detik.com. Hal ini menjadi aspek yang menunjukkan sifat netral dari media Detik.com.

Kelima, Dalam membahas persoalan ekonomi dan anggaran yang menjadi alasan utama dibalik petisi penolakan, Detik.com menekankan bahwa lebih bagus anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi. Menyorot pernyataan Hidayat Nur Wahid dalam menegaskan bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di tengah masa pandemic bukanlah hal yang tepat.

Keenam, namun dilain sisi Detik.com juga menerbitkan pemberitaan yang merespon adanya petisi menolak pemindahan dan pembangunan ibu kota negara dengan menyorot pernyataan seorang pengamat kebijakan publik yaitu Trubus Rahardiansyah bahwa petisi penolakan terhadap IKN dapat memberikan pendidikan yang tak baik untuk menekankan sisi buruk dari adanya petisi tolak IKN yang dinilai memprovokasi. Dengan adanya berita dengan pembahasan tersebut, secara tidak langsung Detik.com menunjukkan sikap yang cenderung tidak pro dengan adanya [etisi]penolakan terhadap IKN.

Ketujuh, perbedaan lainnya antara Kompas.com dan Detik.com dalam memproduksi pemberitaan terkait adanya petisi penolakan terhadap IKN adalah bagaimana Detik.com dalam pemberitaannya masih memuat pernyataan Presiden Jokowi terkait rencana pemindahan IKN mempunyai tujuan untuk kepentingan masa depan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Detik.com yang masih memperhitungkan hal baik yang menjadi tujuan pemerintah dan Presiden Jokowi dalam rencana pemindahan IKN, serta berpandangan bahwa hal tersebut penting untuk diinformasikan kepada para pembaca menjadi hal positive yang patut dipertimbangkan ditengah ramainya gencaran petisi tolak pemindahan IKN.

Selain perbedaan diantara Kompas.com dan Detik.com dalam memproduksi berita terkait adanya Petisi Menolak Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara, memiliki persamaan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu kedua media memiliki pandangan yang sama bahwa fenomena munculnya petisi penolakan terhadap IKN merupakan hal yang penting untuk menjadi topik pemberitaan kepada publik. Selain itu kedua media ini sangat menyorot para tokoh nasional yang menjadi inisiator dalam petisi menolak pemindahan IKN. Kemudian, Kompas.com dan Detik.com pun menyorot hal yang sama dan krusial dalam pembahasan berita yang mereka produksi terkait dengan alasan utama munculnya petisi tolak IKN, yaitu persoalan ekonomi.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa baik Kompas.com dan Detik.com melakukan konstruksi realitas dalam memproduksi pemberitaan

terkait dengan adanya Petisi Menolak Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis *framing* yang telah penulis lakukan dan didapati bagaimana kedua media pemberitaan mengemas sebuah fenomena yang sama yaitu munculnya Petisi Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi suatu pemberitaan yang memiliki perbedaan pembahasan dan hal yang menjadi latar informasi sangat berbeda. Hal ini sesuai dengan teori Konstruksi Realitas Sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Menurut Berger, realitas bukan dibentuk secara alami, akan tetapi realitas dibentuk dan dikonstruksikan. Setiap jurnalis memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mempresepsikan atau melihat suatu fenomena. Pada akhirnya hasil dari pandangan yang dimiliki oleh jurnalis digunakan sebagai latar belakang dalam proses mengkonstruksi realitas dan konteks berita.

PENUTUP

Berdasarkan analisis *framing* yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam mengkonstruksi berita terkait fenomena Petisi Menolak Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara, Kompas.com dan Detik.com melakukan konstruksi isi berita dengan menggunakan *framing* yang berbeda. Kompas.com cenderung membingkai sosok Presiden Jokowi yang keras kepala dan acuh, serta menggunakan sudut pandang yang menyerang pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan munculnya Petisi Menolak Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara, serta secara khusus dikaitkan pada masa periode kedua masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut digambarkan oleh Kompas.com dengan menggunakan para tokoh mantan Pro-Jokowi yang sebelumnya mendukung Jokowi, namun kini berbalik arah mengkritisi hingga turut mendukung Petisi Tolak IKN sebagai inisiator seperti Busyoro Muqqodas, Faisal Basri, Reza Indragiri Amriel, dan Azyumardi Azra yang turut mengkonfirmasi terkait kekecewaan para tokoh kepada Jokowi dengan kemunduran demokrasi dan digantikan oligarki politik terlebih dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara. Selain itu, Kompas.com menggunakan istilah “*negative legacy*” yang dikaitkan dengan berbagai pembuatan legislasi di masa Jokowi yang tidak melibatkan publik seperti dalam proses rencana pemindahan ibu kota negara. Kemudian, Kompas.com cenderung menitik beratkan pada aspek demokrasi yang tercederai dalam proses rencana pemindahan ibu kotanegara.

Detik.com, media ini menggunakan sudut pandang yang cenderung netral tanpa menunjukkan keberpihakan atau condong membela pada salah satu pihak dalam membahas terkait Petisi Menolak Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Detik.com menyorot pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa rencana pemindahan IKN adalah untuk kepentingan masa depan Indonesia, kemudian pada berita produksi Detik.com lainnya juga menyorot pemerintahan Jokowi yang dinilai telah melakukan keputusan brutal dalam proses menghasilkan suatu keputusan dan kebijakan yang berdampak luas terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Pada pemberitaan yang diterbitkan, Detik.com berfokus dalam memberikan informasi seputar perkembangan dari petisi penolakan IKN serta turut memproduksi pemberitaan yang membahas adanya petisi dukungan terhadap pemindahan dan pembangunan IKN. Hal ini menunjukkan sisi netral dari Detik.com dalam memberitakan fenomena rencana pemindahan ibu kota negara. Selain itu Detik.com memuat pernyataan dari seorang Tenaga Ahli Utama kantor Staf Presiden yang berpandangan bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Jokowi memang tak akan bisa menyenangkan semua pihak. Kemudian, Detik.com menyorot bahwa dengan adanya petisi penolakan terhadap pemindahan dan pembangunan ibu kota negara, dapat memberikan pendidikan yang tidak baik untuk menekankan sisi buruk adanya petisi tolak IKN yang dinilai memprovokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Retrieved March 31, 2022, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2021*. Retrieved March 29, 2022, from https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/3
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa*. https://jakarta.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210122142034.pdf
- BAPPENAS RI. (2019). *Dialog Nasional Pemindahan IKN : "KALIMANTAN UNTUK INDONESIA."* <https://www.youtube.com/watch?v=ZepHfGL1f90>
- Change.org, N. I. (2022). *Petisi · Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara · Change.org*. <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-pak-presiden-2022-2024-bukan-waktunya-memindahkan-ibukota-negara>
- detik.com. (2022). *Faisal Basri-Eks Bos KPK Bikin Petisi Tolak Pindah Ibu Kota!* https://finance.detik.com/properti/d-5929083/faisal-basri-eks-bos-kpk-bikin-petisi-tolak-pindah-ibu-kota?_ga=2.157074747.1886520002.1650369101-326765470.1639792851
- detikNews. (2022). *Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota: UU IKN Cacat Prosedural*. <https://news.detik.com/berita/d-5906003/koalisi-masyarakat-kaltim-tolak-pemindahan-ibu-kota-uu-ikn-cacat-prosedural>
- dpr.go.id.(2022). *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37044/t/Fraksi+PKS+Tolak+Tetapkan+R+UU+IKN+jadi+UU>
- DPR RI. (2021). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>
- DPR RI. (2022). *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>
- Ilmawan, M. I. (n.d.). *Analisis Isi Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Portal Berita Online Detik.com dan Republika.co.id*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (n.d.). *Kementerian ESDM RI - Berita Unit - Badan Geologi - Badan Geologi : Jakarta Alami Krisis Air Bersih*. Retrieved March 31, 2022, from <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/badan-geologi-jakarta-alami-krisis-air-bersih>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU+Nomor+23+Tahun+2014.pdf>
- Kompas.com. (n.d.). *Kompas.com Jadi Portal Berita Online Pilihan Generasi Y dan Z Halaman all - Kompas.com*. Retrieved June 23, 2022, from <https://www.kompas.com/edu/read/2020/12/15/200323471/kompascom-jadi-portal-berita-online-pilihan-generasi-y-dan-z?page=all>
- Kompas.com. (2022). *Eks Pimpinan KPK dan 44 Tokoh Nasional Galang Petisi Tolak IKN Nusantara Halaman all - Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/07133961/eks-pimpinan-kpk-dan-44-tokoh-nasional-galang-petisi-tolak-ikn-nusantara?page=all>

- Kurnia, F. A., Helmi, S. A., & Rochmana, S. D. (2021). Konstruksi Media Online Detik. com dan Kompas. com terhadap Vanuatu. *Jurnal Ilmiah KomunikasiMakna*, 9(1), 29–38.
- Littlejohn, S. W. (2009). *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*.
- Masrun, F., Karo, S. B., & Wirasati, W. (2022). Ideologi Media Pada Pemberitaan Nusantara Sebagai Ibu Kota Baru Indonesia. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(1), 42–50.
- Putri, F. N., & Wahid, U. (2021). Pembangkaian Berita Tentang Rencana Pemindahan Ibukota Baru Di Masa Pandemi COVID-19. *PANTAREI*, 5(01).
- Santoso, P. (2016). Konstruksi sosial media massa. *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Sekretariat Presiden. (2019). *Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke 74 Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2019 - YouTube*.
<https://www.youtube.com/watch?v=mzyxuxIbx4c&t=118s>
- Semrush. (2022). *Peringkat 20 Besar Situs Berita (Media Online) di Indonesia Versi Semrush*.
<https://jouron.republika.co.id/posts/33830/peringkat-20-besar-situs-berita-media-online-di-indonesia-versi-semrush>
- similarweb.com. (n.d.). *Top News And Media Websites Ranking in Indonesia in March 2022 / Similarweb*. Retrieved April 19, 2022, from <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/category/news-and-media/>
- Sucipta, J. A. W., & Kurniawan, R. C. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik. com dan Kompas. com Mengenai Kebijakan Kaltim Silent. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 37–49
- Sulu, Y. Z., Londa, J. W., & Kalesaran, E. R. (2022). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN AKSI MENOLAK RUU CIPTA KERJA DI MEDIA ONLINE TIRTO DAN CNN INDONESIA. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 4(1).
- Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2016). Analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan menteri Susi Pudjiastuti (Studi pada situsberita Detik. com, Kompas. com dan Antaranews. com periode Oktober- Desember 2014). *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1).
- Verisk Maplecroft. (2021). *Asian Cities in Eye of Environmental Storm – Global Ranking / Maplecroft*. 1–9. <https://www.maplecroft.com/insights/analysis/asian-cities-in-eye-of-environmental-storm-global-ranking/>
- Wardani, A. I., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Berita Penangkapan Anggota MUI Terduga Terorisme pada Media Online Liputan6. com dan Kompas. com. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2247–2252.
- Yusniar, E., & Retnasary, M. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Menkumham Yasonna Laoly Tentang Kebijakan Pembebasan Narapidana Ditengah Wabah Covid-19:(Media Online detik. com dan kompas. com). *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 1–17